



Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

**Laporan Kinerja Triwulan I
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI Banjarmasin
Tahun 2026**

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI Banjarmasin selama Triwulan I tahun 2026.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	TW I	
			Target	Realisasi
[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)				
[IKU 1.1] Keunggulan layanan LLDIKTI	98	%	98	99.62
[IKU 1.2] Arsitektur Perguruan Tinggi Swasta (PTS)	95	%	92	90.97
[IKU 1.3] Tata kelola LLDIKTI yang berkualitas dan berintegritas	85	Nilai	0	0
[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi				
[IKU 2.1] Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan pada perguruan tinggi swasta oleh LLDIKTI	95	%	0	0
[IKU 2.2] Pencegahan dan penanganan kekerasan, narkoba, dan korupsi	50	%	0	0
[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan				
[IKU 3.1] Fasilitasi pengembangan kemahasiswaan dan prestasi oleh LLDIKTI	95	%	0	0
[IKU 3.2] Jumlah dosen PTS yang meningkat jabatan fungsionalnya	330	Orang	0	0
[IKU 3.3] Fasilitasi Peningkatan Kinerja Penelitian, Publikasi, Pengabdian pada Masyarakat dan Kemitraan PTS	2	%	0	0
[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)				
[IKU 4.1] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	99.92	Nilai	25	49.75

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 1.1] Keunggulan layanan LLDIKTI

Rencana Kegiatan/Aktivitas

1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Januari s.d Maret
2. Pemenuhan sarana dan prasarana (Penambahan Personal Komputer dan Printer yang disediakan untuk Pengguna Layanan) Unit Layanan Terpadu kantor LLDIKTI Wilayah XI. (Bulan Februari 2026)

Progress/Kegiatan

Berdasarkan data responden SKM Triwulan 1 Tahun 2026, survei kepuasan pelayanan ini melibatkan total **260 orang responden** dengan rincian profil sebagai berikut:

- Berdasarkan Jenis Kelamin: Didominasi oleh Laki-laki sebanyak 148 orang, sedangkan Perempuan sebanyak 112 orang. Keterwakilan kedua gender sudah sangat baik.
- Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Jenjang): Mayoritas pengguna layanan adalah lulusan S1/DIV (110 orang) dan S2 (85 orang). Disusul oleh S3 (33 orang), SMA/Sederajat (17 orang), dan DI/DII/DIII (15 orang).

Adapun nilai akhir **IKM 88,83** (Mutu Pelayanan **A / Sangat Baik**) serta nilai **IKU 99,62%** yang didapatkan oleh LLDIKTI Wilayah XI pada Triwulan 1 Tahun 2026.

Selain itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada penilaian SKM Triwulan 1 tahun 2026 ini yakni

Tiga Aspek Terbaik (Apresiasi Tertinggi dari Civitas Akademika)

Kesesuaian Biaya (U4 = 3.719)
Pertanyaan: Kesesuaian biaya pelayanan yang dibayarkan dengan yang diinformasikan.

Unsur ini meraih nilai tertinggi. Pengguna layanan merasa biaya sangat transparan dan jujur. Apa yang diinformasikan di awal (termasuk jika layanan tersebut gratis/Rp0) terbukti sama persis saat proses pelayanan dilakukan. Tidak ada pungutan liar atau biaya tersembunyi.

Kesesuaian Produk Layanan (U5 = 3.623)
Pertanyaan: Kesesuaian produk pelayanan antara yang ada pada publikasi dengan yang diberikan.

Hasil dokumen, SK, atau output layanan digital yang diterima oleh masyarakat dinilai sangat memuaskan dan sesuai persis dengan standar pelayanan yang dipublikasikan instansi.

Kemudahan Prosedur & Ketersediaan Media Pengaduan (U2 dan U8 = 3.565)
Pertanyaan : Kemudahan prosedur yang dijalani (U2) dan ketersediaan sarana/media untuk menyampaikan pengaduan/saran (U8).

Alur birokrasi digital dinilai mudah dipahami oleh pengguna (tidak berbelit-belit). Selain itu, penyediaan fitur pengaduan atau kotak saran digital di dalam sistem dinilai sudah sangat memadai.

Dua Aspek Terendah (Titik Lemah yang Perlu Diperbaiki)

Kecepatan Respon Aplikasi/Sistem (U6 = 3.473) <i>Pertanyaan: Kecepatan respon (membuka halaman, konten, pencarian informasi, unduh/unggah) dari aplikasi sistem pelayanan yang diberikan.</i>	Ini adalah masalah teknis utama yang dirasakan pengguna. Responden merasa performa aplikasi/sistem terkadang lambat (<i>lagging</i>), entah saat <i>loading</i> halaman, mencari informasi, atau ketika mengunggah (<i>upload</i>) berkas persyaratan.
Kesesuaian Waktu Penyelesaian (U3 = 3.492) <i>Pertanyaan: Kesesuaian jangka waktu penyelesaian pelayanan dengan yang diinformasikan.</i>	Ada korelasi erat dengan poin U6. Karena kecepatan aplikasi kurang optimal atau proses verifikasi di <i>back-office</i> daring memakan waktu, durasi penyelesaian layanan terkadang sedikit meleset dari estimasi waktu yang dijanjikan instansi di awal.

Adapun terkait dengan rencana Aksi yakni Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Januari s.d Maret dan Pemenuhan sarana dan prasarana (Penambahan Personal Komputer dan Printer yang disediakan untuk Pengguna Layanan) Unit Layanan Terpadu kantor LLDIKTI Wilayah XI. (Bulan Februari 2026) telah dilakukan.

Kendala/Permasalahan

Secara keseluruhan, hasil rapor pelayanan daring kita sebenarnya sudah berada pada kategori "Baik" karena seluruh unsur penilaian berhasil meraih skor di atas 3,00. Tidak ada nilai yang buruk dalam evaluasi kali ini. Namun, agar mutu pelayanan kita bisa naik kelas menjadi "Sangat Baik", ada dua catatan kecil yang menjadi tantangan kita ke depan.

Catatan pertama adalah terkait kecepatan aplikasi pada unsur U6 yang meraih nilai 3.473. Meskipun nilai ini sudah masuk kategori Baik, angka tersebut merupakan yang paling rendah dibandingkan unsur lainnya. Tantangannya, kita perlu berkoordinasi dengan tim IT untuk memeriksa ulang apakah sistem aplikasi kita yang sesekali melambat saat sivitas akademika mengunduh atau mengunggah berkas, ataukah kendala tersebut murni karena faktor stabilitas jaringan internet dari perangkat yang digunakan oleh masing-masing sivitas akademika saat mengisi survei.

Catatan kedua berkaitan dengan jangka waktu penyelesaian layanan pada unsur U3 dengan nilai 3.492 yang juga berkategori Baik. Karena saat ini sistem pelayanan sudah berbasis daring (*online*), ekspektasi sivitas akademika terhadap kecepatan layanan tentu menjadi jauh lebih tinggi. Tantangan bagi petugas internal kita adalah mempercepat proses verifikasi berkas di komputer masing-masing agar dokumen yang diajukan oleh sivitas akademika bisa selesai dengan lebih kilat dan tidak memakan waktu tunggu yang terlalu lama.

Strategi/Tindak Lanjut

Untuk merespons tantangan tersebut, LLDIKTI Wilayah XI telah akan menyiapkan beberapa langkah nyata pada Triwulan 3 tahun 2026 ini. Langkah pertama adalah mempercepat proses akses dan mengatasi kendala kecepatan aplikasi (U6). Pada triwulan ini, kita merencanakan untuk melakukan pengujian langsung pada sistem informasi PINANDU guna melihat performa kecepatannya saat digunakan. Selain itu, tim IT juga akan mendesain metode kompresi otomatis untuk berkas yang diunggah serta membuat panduan singkat bagi sivitas akademika agar proses akses dari gawai mereka bisa berjalan lebih lancar.

Langkah kedua adalah berfokus pada jangka waktu pelayanan (U3). Kita akan melakukan asesmen atau survei kecil lanjutan secara khusus untuk mengetahui bagaimana sebenarnya persepsi sivitas akademika terhadap waktu layanan yang berjalan selama ini. Hasil asesmen ini nantinya akan menjadi dasar bagi koordinator pelayanan untuk menyesuaikan beban kerja petugas *back-office* serta merancang sistem

notifikasi pengingat otomatis, sehingga pengelolaan dokumen bisa selesai dengan lebih cepat dan tepat waktu.

[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKT)
[IKU 1.2] Arsitektur Perguruan Tinggi Swasta (PTS)

Rencana Kegiatan/Aktivitas

1. Penyiapan bahan usulan program kerja peningkatan mutu akreditasi PT
2. Pendampingan Akreditasi PTS sesuai dengan usulan dari PTS
3. Pemutakhiran data akreditasi perguruan tinggi triwulan I

Progress/Kegiatan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja triwulan I sebanyak 141 PTS di Kalimantan telah terakreditasi dari total 155 PTS dengan capaian kinerja sebesar 90,97%. Capaian ini belum memenuhi target kinerja triwulan I dan akhir 2026 dengan tingkat keberhasilan sebesar 98,88% dari target yang ditetapkan pada triwulan I. Sebanyak 14 PTS belum terakreditasi dikarenakan akreditasi yang kedaluwarsa dan PTS yang memang sudah tidak aktif secara operasional namun belum ditutup. Beberapa PTS sudah mengajukan akreditasi ulang yang diharapkan dapat meningkatkan capaian kinerja pada periode berikutnya. Beberapa program kerja yang sudah dilaksanakan pada triwulan I adalah :

1. Program Kerja peningkatan mutu akreditasi PT telah tersusun.
2. Pendampingan Akreditasi PTS Triwulan I dilaksanakan pada :
 - STIE Palangka Raya, tanggal 3 Maret 2026;
 - AKBID Betang Asi Raya, tanggal 4 Maret 2026.
1. Pemutakhiran data akreditasi perguruan tinggi triwulan I telah dilaksanakan.

Kendala/Permasalahan

Berdasarkan identifikasi kami, Ada 2 (dua) faktor yang menjadi kendala dalam pemenuhan capaian kinerja terkait Akreditasi Perguruan Tinggi Swasta, antara lain :

1. Faktor internal pada PTS :

- **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada PTS hanya Bersifat "Formalitas"**

Masalahnya: Terdapat beberapa PTS yang memiliki dokumen SPMI (Kebijakan, Manual, Standar, Formulir) lengkap di atas kertas, namun siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) tidak berjalan di lapangan.

- **Kualifikasi dan Rasio Dosen yang Tidak Memenuhi Standar**

Masalahnya: PTS kekurangan Dosen Tetap Perguruan Tinggi (DTPT) yang memiliki NIDN, atau kualifikasi akademiknya belum memenuhi syarat minimum (banyak yang belum S3 untuk level institut/universitas, atau belum memiliki jabatan Fungsional minimal Asisten Ahli/Lektor).

- **Produktivitas Tri Dharma yang Rendah dan Tidak Terdokumentasi**

Masalahnya: Kegiatan dosen hanya berputar pada pengajaran. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) sangat minim, jarang melibatkan mahasiswa, dan anggarannya tidak di standarisasi oleh yayasan/kampus.

- **Lemahnya Tata Kelola Keuangan dan Komitmen Badan Penyelenggara PTS**

Masalahnya: Alokasi dana dari Badan Penyelenggara (Yayasan/Perkumpulan) ke PTS sangat terbatas. Pendapatan kampus yang hanya mengandalkan uang kuliah mahasiswa (UKT) sering kali habis untuk operasional rutin dan gaji, tanpa menyisakan anggaran untuk pengembangan mutu.

1. Faktor Eksternal :

Proses transisi ke SAPTO 2.0 (Sistem Pengelolaan Akreditasi Online) yang diwajibkan oleh BAN-PT sering kali memicu beberapa kendala teknis dan administratif bagi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang sedang mengajukan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT).

Secara umum, berikut adalah beberapa kendala utama yang sering dihadapi PTS saat mengajukan APT ke SAPTO 2.0 :

- **Sinkronisasi Data PDDikti yang Lambat**

Kendalanya: SAPTO 2.0 berbasis pada integrasi data digital secara langsung. Sering terjadi penundaan (delay) atau kegagalan sinkronisasi antara data yang sudah diperbarui di PDDikti dengan dasbor SAPTO 2.0. Akibatnya, data kuantitatif institusi di SAPTO terlihat tidak valid atau belum update.

- **Masalah Akses Akun SAPTO 2.0**

Kendalanya: Beberapa PTS belum melakukan migrasi akun dari SAPTO ke SAPTO 2.0, sehingga pengajuan akreditasi ulang perguruan tinggi tidak bisa dilakukan atau terlambat.

- **Ketidakstabilan Tautan Dokumen dan Ukuran File**

Kendalanya: Dokumen borang (LKPT, LED) yang diunggah ke sistem terkadang mengalami corrupt, tautannya tidak stabil (pecah/error saat diakses asesor), atau gagal tersubmit dengan sempurna karena traffic server yang tinggi.

- **Kesalahan Penggunaan Template Borang Kuantitatif**

Kendalanya: SAPTO 2.0 dirancang memiliki pembaca otomatis berbasis template data kuantitatif. Jika PTS mengubah format kolom, menambah baris secara sembarangan, atau memodifikasi formula bawaan pada file Excel template borang, sistem akan menolak dokumen tersebut secara otomatis.

Strategi/Tindak Lanjut

Upaya yang dapat dilakukan oleh LLDIKTI terkait beberapa kendala dalam pemenuhan capaian kinerja terkait Akreditasi Perguruan Tinggi Swasta, antara lain:

1. Optimalisasi program kerja pada tim kerja terkait dalam pemenuhan capaian kinerja IKU 1.2. antara lain :
 - Memastikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada PTS berjalan;
 - Memastikan usulan registrasi dosen pada PDDIKTI dan usulan Jabatan Fungsional berjalan sesuai

standar pelayanan yang ditetapkan;

- Memastikan fasilitasi program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berjalan sesuai dengan ketentuan.
1. Memfasilitasi kendala teknis dan administratif bagi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang sedang mengajukan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dengan Kegiatan Pendampingan.

[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 1.3] Tata kelola LLDIKTI yang berkualitas dan berintegritas

Rencana Kegiatan/Aktivitas

1. Pembentukan tim SAKIP 2026
2. Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2025
3. Evaluasi program kerja dan anggaran tahun 2025
4. Penyelarasan Indikator Kinerja sesuai dengan Peraturan Terbaru
5. Penyusunan konsep rencana pengembangan eSAKIP
6. Reviu Draft Rencana Strategis tahun 2025-2029
7. Tindak Lanjut LHE SAKIP 2025
8. Penetapan tim Zona Integritas tahun 2026
9. Penyusunan rencana program kerja pendukung Zona Integritas
10. Pelaksanaan Program Zona Integritas Triwulan I
11. Pengumpulan Usulan Program Kerja tahun 2026
12. Penyusunan langkah-langkah strategis pelaksanaan Anggaran awal tahun 2026
13. Pelaksanaan penyerapan anggaran dilakukan secara proporsional sesuai dengan target yang ditetapkan
14. Penyusunan dan penetapan target capaian output 2026
15. Penyampaian capaian output triwulan I 2026
16. Penyusunan revisi DIPA
17. Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi & Persepsi Kualitas Pelayanan LKE ZI LLDIKTI Wilayah XI TW

Progress/Kegiatan

Akuntabilitas Kinerja :

Pada Triwulan I Tahun 2026, realisasi angka capaian untuk IKU Tata Kelola LLDIKTI yang Berkualitas dan Berintegritas secara administratif tercatat 0 dengan persentase capaian 0%. Hal ini dikarenakan Nilai/Predikat SAKIP untuk tahun evaluasi berjalan belum ditetapkan secara resmi oleh Kemendiknasaintek.

Meskipun demikian, secara substansi pelaksanaan program kerja dan pemenuhan dokumen pendukung sistem akuntabilitas telah berjalan secara optimal sesuai tahapan awal tahun. Tim SAKIP telah berhasil menyelesaikan beberapa agenda sesuai dengan rencana aksi yang ditetapkan, antara lain: pembentukan Tim SAKIP 2026, penyusunan dan finalisasi Laporan Kinerja Tahun 2025, serta pelaksanaan evaluasi terhadap program kerja dan anggaran tahun lalu. Selain itu, sebagai langkah penyesuaian terhadap regulasi terbaru, tim telah melakukan penyelarasan Indikator Kinerja Utama (IKU), melakukan reviu mendalam terhadap Draft Rencana Strategis (Renstra) LLDIKTI Wilayah XI Periode 2025-2029, mengoordinasikan tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP 2025, serta menyusun konsep pengembangan aplikasi eSAKIP untuk digitalisasi akuntabilitas kinerja. Dari sisi tata kelola keuangan, tim juga telah merumuskan langkah strategis awal tahun, menetapkan target output, menyampaikan laporan capaian output Triwulan I, serta mengawal proses revisi DIPA agar pelaksanaan penyerapan anggaran berjalan proporsional. Terbitnya Kepmendiknasaintek nomor 358/M/KEP/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan LLDIKTI berdampak terhadap IKU LLDIKTI yang hampir seluruhnya mengalami perubahan. Pada IKU sebelumnya, beberapa capaian IKU diukur berdasarkan output yang dihasilkan oleh PTS yang pada IKU saat ini pengukuran capaian berdasarkan dari jumlah fasilitasi yang dilakukan oleh LLDIKTI kepada perguruan tinggi

swasta. Dengan adanya perubahan tersebut maka IKU LLDIKTI menjadi lebih tajam dan selaras dengan tugas dan fungsi LLDIKTI itu sendiri.

Zona Integritas :

Pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi pada triwulan I dimulai dengan pembentukan tim Zona Integritas LLDIKTI Wilayah XI tahun 2026 yang dilanjutkan dengan penyusunan program kerja. Pembangunan Zona Integritas (ZI) difokuskan pada tahap penilaian mandiri oleh Tim Penilai Satuan Kerja (TPSK). Berdasarkan hasil evaluasi terhadap lembar kerja evaluasi (LKE) di 6 area perubahan, LLDIKTI Wilayah XI dinyatakan memenuhi syarat untuk diusulkan ke Tim Penilai Internal (TPI). Selain itu, Tim ZI juga telah merampungkan pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) untuk Triwulan I sebagai pemenuhan indikator pengungkit LKE ZI. Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) adalah :

1. Pembentukan tim zona integritas dan agen perubahan.
2. Penyusunan program kerja oleh setiap manager.
3. Pemenuhan dokumen indikator pengungkit pengusulan zona integritas seperti : Melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi & Persepsi Kualitas Pelayanan TW I, Memastikan tindak lanjut hasil temuan sudah 100%, memastikan pelaporan LHKAN dan LHKASN tahun 2026 selesai 100%, menyusun laporan hasil pembangunan zona integritas. Penyusunan LKE Zona Integritas tahun 2026 oleh setiap manager.
4. Penilaian LKE Zona integritas oleh tim penilai internal LLDIKTI Wilayah XI.
5. Pengusulan Zona Integritas melalui Inspirasi Dikti.

Kendala/Permasalahan

Akuntabilitas Kinerja :

1. Periode penilaian dan penetapan Predikat SAKIP Kemendikstisaintek belum memasuki jadwal pengumuman resmi pada Triwulan I, sehingga nilai capaian akhir tahun 2026 belum dapat diinput secara sistem.
2. Pemahaman terhadap kriteria dan formula perhitungan sesuai Kepmendikstisaintek nomor 358/M/KEP/2025 belum optimal.
3. Aplikasi eSAKIP belum disesuaikan dengan IKU terbaru.
4. Rencana Strategis tahun 2025-2029 masih berbentuk draft

Zona Integritas :

Berikut adalah beberapa kendala teknis terkait pengusulan ZI WBK Pada tahun 2026

1. Beberapa dosen ASN terkendala dalam laporan SPT pajak (LHKASN) tahun 2025 sebagai pemenuhan Syarat Wajib Pengajuan ZI WBK sebelum tanggal 31 Maret 2026.

Strategi/Tindak Lanjut

Akuntabilitas Kinerja :

1. Menyiapkan dokumen pendukung terkait persiapan penilaian mandiri SAKIP pada LLDIKTI Wilayah XI.
2. Melaksanakan kegiatan penyamaan persepsi IKU baru sesuai dengan Kepmendikstisaintek nomor 358/M/KEP/2025.
3. Menyusun rencana pengembangan aplikasi eSAKIP agar selaras dengan IKU terbaru.
4. Melakukan reviu dan perbaikan draft Rencana Strategis tahun 2025-2029 sebelum difinalisasi.

Zona Integritas :

Berikut adalah tindak lanjut yang telah dilakukan

1. Untuk menindaklanjuti dosen yang terkendala dalam pelaporan maka tim Zona Integritas LLDIKTI XI melakukan pendampingan secara intensif kepada beberapa dosen ASN untuk mempercepat pelaporan SPT pajak (LHKASN) tahun 2025. Pengumpulan data laporan SPT pajak tahun 2025 melalui sistem SARLAIN LLDIKTI Wilayah XI untuk memudahkan verifikasi internal.

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.1] Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan pada perguruan tinggi swasta oleh LLDIKTI

Rencana Kegiatan/Aktivitas

1. Penyusunan program kerja
2. Penyusunan instrumen pengumpulan data kinerja

Progress/Kegiatan

Indikator ini mengukur sejauh mana keberhasilan fasilitasi LLDIKTI Wilayah XI dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan khususnya di pembelajaran dan SPMI pada PTS di Kalimantan. Capaian kinerja pada Triwulan I tercatat sebesar 0% dari target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan pada periode Triwulan I, fokus utama tim kerja masih berada pada tahapan persiapan dasar, penyusunan instrumen, dan belum memasuki jadwal pelaksanaan intervensi fisik ke PTS, serta belum adanya pengajuan pelayanan fasilitasi penjaminan mutu secara mandiri oleh PTS ke LLDIKTI.

Selama periode ini, program kerja yang berhasil dilaksanakan adalah penyusunan program kerja tahunan serta penyusunan instrumen pengumpulan data kinerja sebagai landasan pelaksanaan fasilitasi pada triwulan berikutnya agar sesuai dengan syarat dan kriteria pada Keputusan Mendiknas/Depdiknas nomor 358 tahun 2005.

Kendala/Permasalahan

1. Kendala utama dalam pemetaan awal fasilitasi SPMI adalah adanya proses transisi dan pengembangan sistem pada laman resmi SPMI pusat. Hal ini menyebabkan proses sinkronisasi, pemantauan data sekunder, maupun akses awal terhadap dokumen SPMI perguruan tinggi belum bisa diakses secara normal sepanjang Triwulan I (masalah ini telah dikoordinasikan ke Belmawa Kemendiknas/Depdiknas).
2. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026 yang masih dalam proses penetapan ikut membatasi ruang akselerasi pelaksanaan program intervensi fisik secara masif ke PTS pada awal tahun.
3. Terdapat beberapa PTS di Wilayah XI yang secara operasional sudah tidak aktif namun secara legal-formal belum resmi ditutup. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam validasi basis data serta berpotensi menimbulkan deviasi pada persentase pemenuhan target akhir PTS yang difasilitasi.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Berkoordinasi secara intensif dengan tim teknis/pengembang sistem pusat untuk memantau perkembangan dan mempercepat normalisasi akses website SPMI agar dapat segera digunakan kembali sebagai instrumen pemetaan.
2. Mematangkan program kerja Fasilitasi SPMI Perguruan Tinggi serta meningkatkan kolaborasi intensif bersama tim fasilitator SPMI Wilayah XI untuk menyamakan persepsi terhadap petunjuk teknis pelaksanaan yang siap diimplementasikan pada Triwulan II.
3. Melakukan pemetaan khusus dan evaluasi mendalam terhadap PTS yang terindikasi tidak aktif, serta mengkoordinasikan hasilnya dengan tim kerja kelembagaan untuk pemberian pembinaan atau rekomendasi langkah tindak lanjut strategis (seperti penggabungan/penutupan) sesuai regulasi yang berlaku

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi
[IKU 2.2] Pencegahan dan penanganan kekerasan, narkoba, dan korupsi

Rencana Kegiatan/Aktivitas

1. Penyusunan program kerja Tahun 2026
2. Penyusunan instrumen pengumpulan data kinerja

Progress/Kegiatan

Pada triwulan pertama Tahun 2026, capaian Indikator Kinerja [IKU 2.2] Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, Narkoba, dan Korupsi belum dapat direalisasikan sehingga capaian Triwulan I tercatat sebesar 0%. Hal tersebut bukan karena tidak adanya pelaksanaan kegiatan, melainkan karena masih menunggu penetapan kriteria pengukuran yang memuat persyaratan minimal suatu kegiatan atau capaian agar dapat diperhitungkan sebagai bagian dari indikator kinerja oleh Kementerian.

Meskipun demikian, Tim Kerja Akademik dan Kemahasiswaan telah melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung pencapaian indikator tersebut, antara lain:

1. Menindaklanjuti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Nomor UND/150/DKM.00/80-82/02/2026 tanggal 24 Februari 2026 melalui penerusan surat kepada Perguruan Tinggi Swasta terkait kegiatan Bedah Buku Perguruan Tinggi Berintegritas Tanpa Gratifikasi;
2. Meneruskan Undang-Undang Sosialisasi Susulan Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan Tahun 2026 berdasarkan surat KPK RI Nomor UND/31/DKM.00/80-82/01/2026 tanggal 21 Januari 2026 kepada Perguruan Tinggi Swasta di wilayah LLDIKTI Wilayah XI;
3. Menyusun dan menyampaikan surat Apresiasi dan Imbauan Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) kepada Perguruan Tinggi Swasta sebagai bentuk penguatan implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi;
4. Menyusun surat Persiapan Pemenuhan Data Capaian IKU 5 sebagai langkah awal dalam mempersiapkan pengumpulan data pendukung capaian indikator;
5. Melakukan rekapitulasi pembaruan data Satgas PPKPT melalui Portal Sahabat sebagai bagian dari monitoring pembentukan dan pembaruan data Satgas PPKPT pada Perguruan Tinggi Swasta; dan
6. Menyusun program kerja Tahun 2026 serta menyusun instrumen pengumpulan data sebagai dasar pelaksanaan pengukuran capaian indikator pada triwulan berikutnya.

Seluruh kegiatan tersebut merupakan upaya pembinaan, koordinasi, dan persiapan yang mendukung pencapaian IKU 2.2. Namun demikian, realisasi indikator belum dapat dihitung karena masih menunggu penetapan kriteria pengukuran yang menjadi acuan resmi dalam penilaian capaian kinerja.

Kendala/Permasalahan

1. Sampai dengan berakhirnya Triwulan I Tahun 2026, kriteria pengukuran IKU 2.2 yang menjadi dasar penilaian capaian belum ditetapkan, sehingga kegiatan yang telah dilaksanakan belum dapat dikonversi menjadi realisasi indikator kinerja.
2. Pelaksanaan kegiatan pada Triwulan I masih berfokus pada pembinaan, sosialisasi, koordinasi, serta persiapan administrasi dan penguatan tata kelola, sehingga belum menghasilkan data yang dapat dihitung sebagai capaian indikator.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Realisasi indikator belum dapat dihitung karena proses pengumpulan data dari Perguruan Tinggi Swasta masih menunggu penyelarasan mekanisme pengukuran dan kriteria penilaian yang ditetapkan oleh kementerian.
2. Melaksanakan pengumpulan dan verifikasi data capaian dari Perguruan Tinggi Swasta sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

3. Melanjutkan pembinaan kepada Perguruan Tinggi Swasta melalui sosialisasi, monitoring, dan pendampingan terkait implementasi pencegahan dan penanganan kekerasan, pencegahan penyalahgunaan narkoba, serta penguatan budaya antikorupsi.
4. Melakukan pemutakhiran data Satgas PPKPT dan monitoring terhadap kepatuhan Perguruan Tinggi Swasta dalam memenuhi kebijakan yang mendukung pencapaian IKU.
5. Melakukan evaluasi berkala terhadap hasil pengumpulan data sebagai dasar pengukuran dan pelaporan capaian kinerja pada triwulan berikutnya.

[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan
[IKU 3.1] Fasilitasi pengembangan kemahasiswaan dan prestasi oleh LLDIKTI

Rencana Kegiatan/Aktivitas

1. Penyusunan program kerja
2. Penyusunan instrumen pengumpulan data kinerja
3. Persiapan kegiatan Penjurian Pemilihan Mahasiswa Berprestasi
4. Persiapan kegiatan Pelatihan Singkat Mahasiswa Berprestasi

Progress/Kegiatan

Pada triwulan pertama Tahun 2026, capaian Indikator Kinerja [IKU 3.1] Fasilitasi pengembangan kemahasiswaan dan prestasi oleh LLDIKTI belum dapat direalisasikan secara kuantitatif sehingga capaian Triwulan I tercatat sebesar 0%. Hal tersebut terjadi karena pelaksanaan program masih menunggu penyesuaian panduan serta linimasa resmi Pilmapres dari Direktorat Belmawa. Meskipun demikian, Tim Kerja Akademik dan Kemahasiswaan telah melaksanakan berbagai langkah persiapan strategis, antara lain:

1. Mengikuti kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Pilmapres Tahun 2026 melalui zoom meeting yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemdiktisainstek pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2026.
2. Menindaklanjuti surat pengantar panduan Pilmapres Tahun 2026 dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemdiktisainstek tanggal 27 Februari 2026 melalui penerusan surat dan panduan ke Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di LLDIKTI Wilayah XI
3. Melakukan rapat persiapan desk evaluation peserta Pilmapres tingkat wilayah Tahun 2026.
4. Menyusun dan menyampaikan surat pemberitahuan pembukaan seleksi tingkat wilayah XI pada 29 Maret 2026 ke seluruh Perguruan Tinggi di LLDIKTI Wilayah XI.

Seluruh kegiatan tersebut merupakan upaya koordinasi, dan persiapan yang mendukung pencapaian IKU [IKU 3.1] Fasilitasi pengembangan kemahasiswaan dan prestasi oleh LLDIKTI.

Kendala/Permasalahan

1. Sampai dengan berakhirnya Triwulan I Tahun 2026, kriteria pengukuran IKU 3.1 yang menjadi dasar penilaian capaian belum dilaksanakan.
2. Pelaksanaan kegiatan pada Triwulan I masih berfokus pada sosialisasi, koordinasi, serta persiapan administrasi untuk Persiapan kegiatan Penjurian Pemilihan Mahasiswa Berprestasi sehingga belum dapat dihitung sebagai capaian indikator.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Memastikan pelaksanaan agenda utama yaitu Penjurian Pilmapres Tingkat Wilayah XI Tahun 2026 berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan pada bulan April 2026, guna menghasilkan perwakilan mahasiswa berprestasi dari wilayah XI.
2. Melakukan rekapitulasi data hasil penjurian dan segera menginput capaian persentase fasilitasi pengembangan kemahasiswaan pada Triwulan II, setelah kriteria pengukuran indikator terpenuhi secara administratif dan substantif.

3. Optimalisasi Koordinasi dengan Perguruan Tinggi selama proses seleksi berjalan, guna memastikan partisipasi kuota peserta terpenuhi secara maksimal.

[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan
[IKU 3.2] Jumlah dosen PTS yang meningkat jabatan fungsionalnya

Rencana Kegiatan/Aktivitas

1. Penyusunan program kerja
2. Penyusunan instrumen pengumpulan data kinerja
3. Persiapan kegiatan Bimbingan Teknis Percepatan Jabatan Akademik Lektor Kepala Dan Guru Besar Melalui Penguatan Publikasi Jurnal Bereputasi
4. Persiapan kegiatan Bimbingan Teknis Usulan Kenaikan Jabatan Fungsional Asisten Ahli Ke Lektor Melalui Singkron Versi 3
5. Persiapan kegiatan Workshop Penyusunan SKP Dan Perhitungan Angka Kredit Penelitian Bagi Dosen Tetap Yayasan
6. Pelaksanaan penilaian angka kredit dosen
7. Evaluasi sistem layanan penilaian angka kredit dosen (Singkron)
8. Pendampingan layanan jabatan fungsional dosen

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan I capaian kinerja untuk indikator ini masih 0 karena masih dalam persiapan tahap hulu penyusunan rencana pengumpulan data kinerja sesuai dengan syarat dan kriteria yang ada pada Kepmendikstisaintek nomor 358 tahun 2025. Pada Kepmen tersebut kenaikan pangkat jabatan fungsional dosen memenuhi syarat apabila sebelumnya telah dilakukan pembinaan oleh LLDIKTI Wilayah XI. Pelaksanaan program kerja difokuskan pada tahap perencanaan dan persiapan pelaksanaan kegiatan fasilitasi. Kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi penyusunan program kerja, penyusunan instrumen pengumpulan data kinerja, serta persiapan teknis dan administratif untuk penyelenggaraan Bimbingan Teknis Percepatan Jabatan Akademik Lektor Kepala dan Guru Besar melalui Penguatan Publikasi Jurnal Bereputasi, Bimbingan Teknis Usulan Kenaikan Jabatan Fungsional Asisten Ahli ke Lektor melalui aplikasi SINGKRON Versi 3, dan Workshop Penyusunan SKP serta Perhitungan Angka Kredit Penelitian bagi Dosen Tetap Yayasan.

Selain kegiatan persiapan, layanan rutin tetap dilaksanakan melalui penilaian angka kredit dosen, pendampingan layanan jabatan fungsional dosen, serta evaluasi terhadap sistem layanan penilaian angka kredit melalui aplikasi SINGKRON sebagai upaya menjaga kualitas pelayanan. Dengan terlaksananya tahapan persiapan tersebut, seluruh kebutuhan administrasi dan teknis untuk pelaksanaan kegiatan fasilitasi pada Triwulan II telah dipersiapkan sesuai rencana.

Kendala/Permasalahan

1. Berdasarkan linimasa program kerja, pelaksanaan fisik kegiatan fasilitasi jabatan fungsional dosen ke PTS memang direncanakan untuk dilaksanakan mulai Triwulan II, sehingga Triwulan I sepenuhnya dialokasikan untuk penyiapan instrumen, penyelarasan regulasi, dan kurasi data usulan.
2. Persiapan administrasi, materi, dan koordinasi dengan narasumber serta peserta masih dalam proses penyelesaian.
3. Masih terdapat usulan jabatan akademik yang memerlukan perbaikan kelengkapan dokumen sehingga memerlukan pendampingan lebih lanjut.
4. Penyesuaian materi dengan ketentuan terbaru mengenai jabatan akademik dan penilaian angka kredit memerlukan proses koordinasi dan penyempurnaan.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Menyelesaikan seluruh persiapan administrasi, teknis, dan substansi kegiatan fasilitasi.
2. Melaksanakan kegiatan fasilitasi jabatan fungsional dosen ke PTS sesuai jadwal pada Triwulan II.

3. Melanjutkan pendampingan kepada perguruan tinggi dan dosen dalam proses pengusulan jabatan akademik guna memastikan kelengkapan dan kesesuaian usulan dengan ketentuan yang berlaku.
4. Mengoptimalkan layanan penilaian angka kredit dosen melalui pemanfaatan aplikasi SINGKRON dan SISTER, disertai pendampingan teknis kepada perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas dan ketepatan proses pengusulan.

[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan

[IKU 3.3] Fasilitasi Peningkatan Kinerja Penelitian, Publikasi, Pengabdian pada Masyarakat dan Kemitraan PTS

Rencana Kegiatan/Aktivitas

1. Penyusunan program kerja
2. Penyusunan instrumen pengumpulan data kinerja
3. Persiapan kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kerjasama Perguruan Tinggi
4. Pendampingan layanan Penelitian, Publikasi, Pengabdian pada Masyarakat dan Kemitraan PTS

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan I, realisasi fisik capaian IKU 3.3 secara kuantitatif masih tercatat 0% karena pelaksanaan program fasilitasi langsung ke Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dijadwalkan pada triwulan berikutnya. Fokus kerja Tim pada Triwulan I diarahkan pada tahapan hulu, meliputi penyusunan program kerja, perancangan instrumen pengumpulan data, serta pemetaan awal terhadap PTS sasaran guna menyelaraskan rencana intervensi dengan kriteria teknis yang dipersyaratkan.

Kendala/Permasalahan

Dalam persiapan pelaksanaan program, beberapa kendala teknis dan administratif yang berhasil diidentifikasi sebagai berikut:

1. Masih terdapat ambiguitas dan multitafsir pada petunjuk teknis formulasi pengukuran capaian IKU 3.3, sehingga memerlukan waktu koordinasi tambahan untuk menyamakan persepsi pengukuran agar pelaporan akhir tetap akurat dan akuntabel.
2. Adanya penetapan syarat tambahan yang cukup ketat terkait kualifikasi dan kriteria peserta PTS yang dapat diakui ke dalam capaian IKU, sehingga tim harus melakukan kurasi dan verifikasi data profil peserta secara lebih selektif dan mendalam sebelum kegiatan dimulai.

Strategi/Tindak Lanjut

Guna mengatasi kendala tersebut dan memastikan target tahunan tetap tercapai secara optimal, langkah strategis yang akan dilaksanakan adalah:

1. Melakukan koordinasi aktif dan konsultasi dengan unit kerja pembina di tingkat pusat/kementerian untuk memperjelas formula pengukuran dan menyepakati parameter keberhasilan IKU 3.3.
2. Melakukan verifikasi dan validasi data profil dosen/PTS di wilayah kerja LLDIKTI XI secara berkala guna menyaring calon peserta yang benar-benar memenuhi kriteria pengakuan kinerja.
3. Mematangkan persiapan teknis pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengisian SINTA yang dijadwalkan pada Triwulan III agar dapat menjangkau partisipasi peserta yang eligible secara maksimal dan efektif.

[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 4.1] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

Rencana Kegiatan/Aktivitas

1. Pengajuan UP Bendahara tahun 2026
2. Penyusunan jadwal kegiatan
3. Penyusunan kebutuhan riil anggaran triwulan I
4. Penyusunan rencana penarikan anggaran triwulan I
5. Monitoring dan evaluasi anggaran triwulan I
6. Koordinasi tim pengelola keuangan dengan perencanaan
7. Assesment internal capaian kinerja anggaran triwulan I
8. Clearance belanja TIK tahun 2026
9. Melakukan revisi penajaman anggaran tahun 2026
10. Penyampaian proyeksi target capaian output
11. Penyampaian realisasi capaian output triwulan I
12. Pengawasan proses pelaksanaan rencana belanja kontraktual triwulan I
13. Penyiapan bahan revisi internal (POK)
14. Melakukan Rekonsiliasi Keuangan

Progress/Kegiatan

Berdasarkan hasil Pengukuran Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-KL pada Triwulan I Tahun 2026, realisasi capaian kumulatif IKU 4.1 tercatat sebesar 49,75 dari target Triwulan I sebesar 25, atau mencapai tingkat keberhasilan sebesar 199% dari target Triwulan I. Secara umum, performa pelaksanaan anggaran pada awal tahun ini dinilai sudah sangat baik. Komponen utama penilaian kinerja anggaran ini ditopang oleh nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang berhasil meraih skor tinggi yaitu 99,5. Namun demikian, nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) pada aplikasi SMART/Monev saat ini masih tercatat 0.

Selama periode Triwulan I, Tim Keuangan telah berhasil mengeksekusi seluruh 14 rencana aksi yang ditetapkan, antara lain:

- **Aspek Pengelolaan Keuangan & Anggaran:** Menyelesaikan pengajuan Uang Persediaan (UP) Bendahara 2026, menyusun jadwal kegiatan, kebutuhan riil, serta Rencana Penarikan Dana (RPD) Triwulan I. Tim juga telah melakukan rekonsiliasi keuangan secara berkala serta penyiapan bahan revisi internal Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan revisi penajaman anggaran tahun 2026.
- **Aspek Akuntabilitas & Pengawasan:** Melakukan monitoring evaluasi anggaran, koordinasi dengan tim perencanaan, melakukan *assessment* internal capaian kinerja, serta mengurus *clearance* belanja TIK tahun 2026. Selain itu, tim secara aktif mengawal pengawasan proses pelaksanaan rencana belanja kontraktual, serta menyampaikan proyeksi dan realisasi capaian output Triwulan I tepat waktu.

Kendala/Permasalahan

Meskipun secara umum capaian kinerja dinilai baik, terdapat beberapa kendala teknis dan substantif yang menyebabkan nilai kinerja anggaran kurang maksimal, yaitu:

1. Kurang Maksimalnya Penyerapan Belanja Barang (IKPA = 99,5): Perolehan nilai IKPA belum mampu menyentuh angka sempurna 100 karena realisasi belanja barang belum mencapai target belanja barang sesuai porsi dari kemenkeu.
2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026 yang masih dalam proses finalisasi berimplikasi pada belum optimalnya akselerasi pelaksanaan beberapa program kerja di setiap bidang, yang kemudian memicu rendahnya penyerapan belanja barang di awal tahun.
3. Nilai Kinerja Perencanaan pada aplikasi Monev Kemenkeu belum sepenuhnya dapat ditampilkan atau dioptimalkan pada bulan Maret. Hal ini disebabkan karena Nilai Kinerja Perencanaan memerlukan proses sinkronisasi dan penyiapan data referensi dari berbagai sistem internal (seperti Renja dan RKK) yang membutuhkan waktu di awal tahun anggaran.

Strategi/Tindak Lanjut

Guna mempertahankan performa dan menyelesaikan kendala teknis di atas, Tim Keuangan akan melaksanakan beberapa langkah nyata pada triwulan berikutnya:

1. Melakukan re-evaluasi dan penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) pada kalender kegiatan Triwulan II, serta mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan di setiap tim kerja agar penyerapan belanja barang berjalan lebih proporsional dan presisi sesuai target.
2. Meningkatkan kolaborasi intensif antara tim perencanaan dengan tim pengelola keuangan untuk melakukan asistensi percepatan pengumpulan data dukung persiapan penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja 2026, agar program kerja dapat berjalan optimal guna mendorong nilai kinerja anggaran yang semakin baik.
3. Melakukan koordinasi aktif dengan Tim Keuangan dan Perencanaan Kementerian Pusat untuk mengawal proses integrasi data agar nilai EKA pada aplikasi Monev Kemenkeu dapat segera ter-update secara normal.

C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[DK.7733.BDB.001] Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang mendapatkan layanan pembinaan peningkatan mutu	Lembaga	2	130	Rp4.937.739.000	Rp2.339.530.593	47.38
2	[DK.7733.BDB.002] Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang Mendapat Layanan Rekomendasi	Lembaga	4	9	Rp79.356.000	Rp16.646.000	20.98
3	[DK.7733.BEJ.001] Dosen Non PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	Orang	1659	1955	Rp69.584.684.000	Rp69.580.886.700	99.99
4	[WA.7735.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	1	0	Rp489.586.000	Rp321.590.001	65.69
5	[WA.7735.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	1	0	Rp76.722.324.000	Rp74.993.495.315	97.75
6	[WA.7735.EBA.Z07] Layanan BMN	Layanan	1	0	Rp9.857.000	Rp0	0
7	[WA.7735.EBB.951] Layanan Sarana Internal	Paket	0	3	Rp145.260.000	Rp120.257.400	82.79
8	[WA.7735.EBB.971] Layanan Prasarana Internal	Paket	0	0	Rp175.575.000	Rp94.216.500	53.66
Total Anggaran					Rp152.144.381.000	Rp147.466.622.509	96.93

D. Rekomendasi Pimpinan

1. Menjadikan hasil evaluasi kepuasan pengguna secara konsisten sebagai dasar utama dalam menyusun rekomendasi perbaikan, guna memberikan pelayanan yang lebih baik dan solutif kepada seluruh *stakeholder*.
2. Memastikan seluruh syarat dan kriteria pelaksanaan program fasilitasi LLDIKTI Wilayah XI kepada Perguruan Tinggi Swasta sepenuhnya sudah berpedoman pada Kepmendiktisaintek Nomor 358 Tahun 2025 yang mengedepankan kualitas fasilitasi instansi.
3. Meningkatkan sinergi dan komunikasi berkala antarseluruh bidang dalam proses pengumpulan, penyalarsan, dan akumulasi data agar sistem pelaporan capaian indikator organisasi dapat terwujud secara utuh dan terintegrasi.
4. Segera menyusun langkah-langkah strategis dan rencana aksi konkret untuk mewujudkan tercapainya predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) pada LLDIKTI Wilayah XI.



Banjarmasin, 17 Juli 2026

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah XI,


Muhammad Akbar